



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019-2024**

**KABUPATEN MAGELANG
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. ENDRA ENDAH WACANA, M.M

NIP. : 19630908 198903 1 008

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasar SK Bupati Nomor 824/634/22/2018 tanggal 27 Desember Tahun 2018 bertugas untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

**Plt. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**



Drs. ENDRA ENDAH WACANA, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UUD 45 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pada ayat 2 disebutkan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasa 28c ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan menempati posisi strategis bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat kedua urusan tersebut bersifat saling mempengaruhi, melengkapi dan memperkaya. Dalam realitasnya, pendidikan dan kebudayaan dapat dipahami sebagai siklus berkelanjutan, sehingga proses pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan manusia. Disisi lain keluaran pendidikan dalam kurun waktu tertentu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang berdampak pada perubahan nilai budaya umat manusia. Dalam konteks urusan pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang.

Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Urusan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Jabaran atas amanat pemajuan kebudayaan Sebagai landasan normatif urusan kebudayaan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan normatif bagi Pemerintah dan Daerah dalam melaksanakan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.

Dengan demikian dipahami bahwa titik temu pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan berada pada pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Sehingga layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk mensinergikan pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang maka penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2019 – 2024.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai salah satu bentuk upaya implementasi Visi – Misi Pembangunan Kabupaten Magelang, terutama Misi ke 1 tentang Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama. Visi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 3 (tiga) misi yaitu:

1. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia,
2. meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan
3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Disamping itu, agar penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun penetapan kegiatan dalam Rencana Strategis terutama didasarkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang tahun 2005 - 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka diamanatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Magelang untuk menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019 -2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540).
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan jangka menengah Kabupaten Magelang dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Magelang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.

2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 - a. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

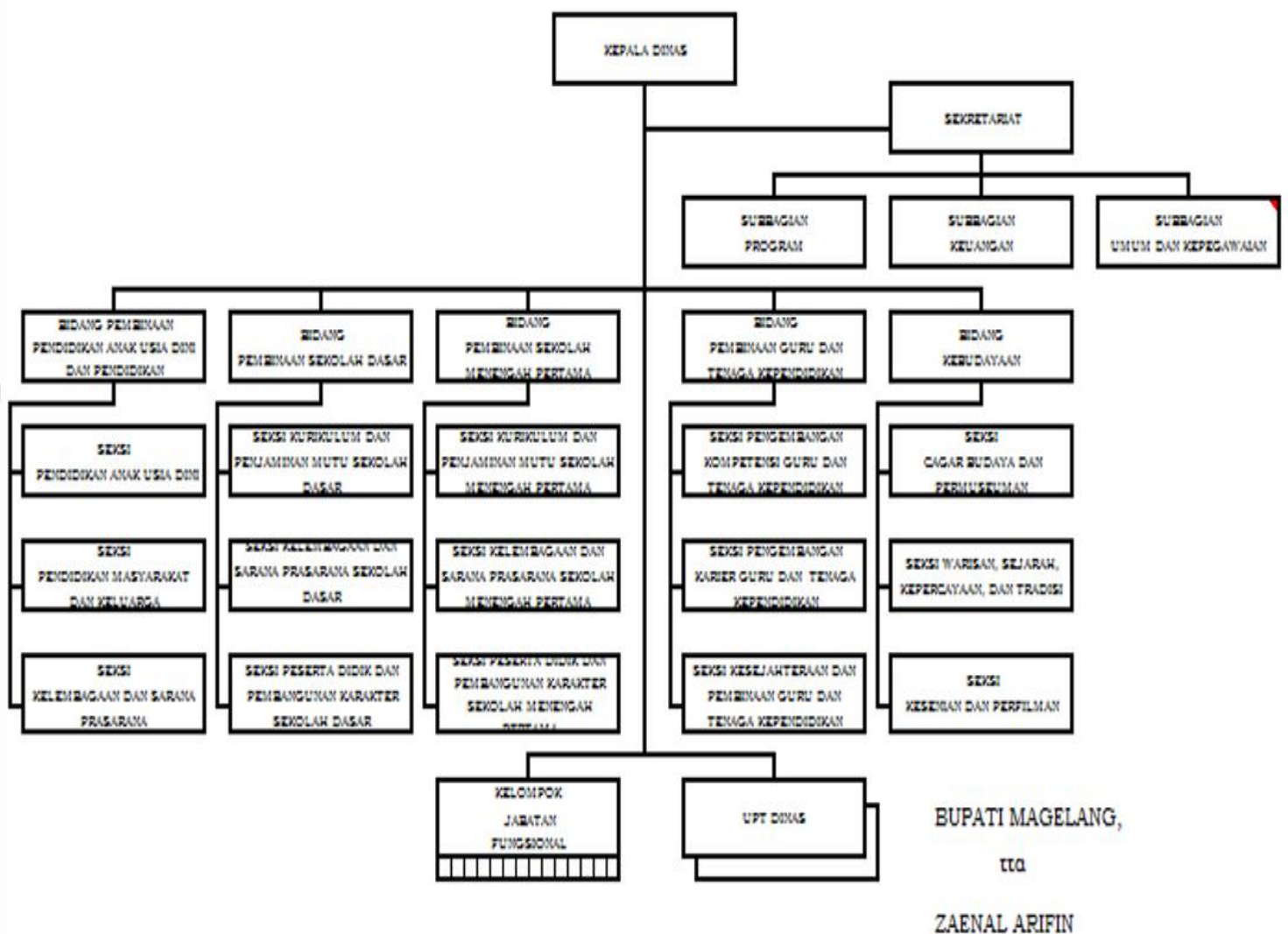
BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Gambar 2.1
 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
 Magelang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sementara Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- g. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- i. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- j. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- m. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- p. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang sebagai berikut :

- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
 1. Subbag Program
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Keluargasi
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi 3 (tiga) Seksi , yaitu :
1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Sekolah Menengah Pertama
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama
- e. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
 2. Seksi Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan
 3. Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
- f. Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 2. Seksi Warisan, Sejarah, Kepercayaan dan Tradisi
 3. Seksi Kesenian dan Perfilman

Rincian Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 9) Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- 10) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 12) Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 14) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 16) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan keluarga, kelembagaan dan sarana prasarana, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan keluarga, kelembagaan dan sarana prasarana.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 9) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 10) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- 11) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 13) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar.
- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
- 9) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pembinaan Sekolah Dasar.

- 11) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 4) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 6) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama.
- 7) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama.

- 8) Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 9) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 11) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan penjaminan mutu, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan kompetensi,

pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan Karier guru dan tenaga kependidikan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 7) Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan administrasi umum dan keuangan bidang guru dan tenaga kependidikan.
- 8) Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 9) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 10) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan kompetensi, pengembangan Karier, kesejahteraan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan cagar budaya, permuseuman, warisan, sejarah, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kebudayaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan warisan sejarah, kepercayaan, pelestarian tradisi, bahasa serta pembinaan kesenian dan perfilman.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan warisan sejarah, kepercayaan, pelestarian tradisi, bahasa serta pembinaan kesenian
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan sejarah lokal kabupaten.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penertiban izin membawa cagar budaya keluar kabupaten.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan museum kabupaten.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi di bidang kebudayaan.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kebudayaan.
- 14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang kebudayaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebudayaan.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kebudayaan.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1. Potensi SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada awal tahun 2019, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak : 78 orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana strata-2. Dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang terdapat 25 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil	Formasi
1	2		3	4	5
1	Struktural	Kepala Dinas	II.A	0	1
		Sekretaris	III.A	0	1
		Kepala Bidang	III.B	4	6
		Kepala Sub Bagian	IV.A	2	3
		Kasi	IV.A	13	15
2	Jabatan Fungsional	Pengawas SMP	-	4	8
3	Fungsional Umum/	Staf	-	55	72
Jumlah				78	106

Sumber : SubBag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1 personil atau pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebanyak 78 orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 19 orang pejabat struktural dan 59 orang pejabat fungsional umum/fungsional tertentu. Dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mayoritas

merupakan lulusan S1 dan S2. Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Jenjang Pendidikan SDM Pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Magelang

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1.	Pasca sarjana (S.2)	19	24,36
2.	Sarjana (S.1)	33	42,31
3.	Diploma 3/Akademi	9	11,54
4.	SLTA	17	21,79
5.	SLTP		
6.	SD		
JUMLAH		78	100,00

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Sedangkan SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 52,54% dan golongan II sebanyak 36,44%. Secara lebih rinci sebagaimana pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Magelang Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	19	24,36
2.	Golongan III	53	67,95
3.	Golongan II	6	7,69
4.	Golongan I	0	0
JUMLAH		78	100,00

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Sementara itu jika ditinjau dari sisi Gender, maka SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang terdapat 41 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 13 pejabat struktural dan 61 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang yang terdiri dari 13 pejabat struktural dan 27 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada

Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Magelang Menurut Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Pejabat Struktural	13	6
2.	Jabatan Fungsional Umum/ Tertentu	28	31
JUMLAH		41	37

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Disdikbud Kabupaten Magelang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana pada Disdikbud Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	2	Gedung
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	7	Unit
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	92	Unit
4	Meja	347	Unit
5	Kursi / Kursi Sice	676	Unit
6	<i>Filling Cabinet</i>	18	Unit
7	Lemari / Lemari Arsip	67	Unit
8	Rak Arsip	56	Unit
9	Brankas	2	Unit
10	Komputer	55	Unit
11	Pemadam Kebakaran	12	Unit
12	Televisi	10	Unit
13	Mesin Tik	3	Unit
14	Trolley Dorong	2	Unit
15	Telepon/ fax	2	Unit
16	Dispenser	12	Unit
17	Cermin besar	2	Buah
18	Jam Dinding	10	Buah
19	Kipas Angin	12	Unit
20	Vacum Cleaner	4	Buah
21	Laptop	57	Unit

22	Mesin Hitung/Kalkulator	5	Unit
23	Scanner	4	Unit
24	Mesin Potong Rumput	1	Unit
25	Sound System Portable	6	Unit
26	LCD Proyektor	14	Unit
27	Papan White Board		Buah
28	Printer/Printonix	62	Unit
29	UPS	3	Unit
30	Wireless	6	Unit
31	Kamera digital	2	Unit
32	Video Camera	1	Unit
33	Kulkas	4	Unit
34	AC	30	Unit
35	Megaphone	2	Unit
36	AC Portable	5	Unit
37	Speaker Internal	30	Unit
38	Papan Pengumuman	7	Unit
39	Amplifier	6	Unit
40	CCTV	10	Unit

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

a. Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar	52,66	55,57	60,27	62,64	64,79
Angka Partisipasi Kasar	99,87	99,87	103,69	105,87	106,76
Angka Partisipasi Kasar	83,52	84,49	82,40	88,38	91,67
Angka Partisipasi Kasar	78,68	79,98	82,12	85,63	87,74

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2019

APK jenjang SD tahun 2014-2018 telah mencapai 100%, bahkan melampaui. Namun untuk jenjang SMP sederajat APK belum mencapai 100%. Besaran APK tidak sampai 100

menunjukkan masih ada anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak sekolah. Hal ini secara umum menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai ideal APM adalah 100%.

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	87,02	86,74	89,70	92,66	94,78
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	62,40	64,86	62,78	67,76	71,48
Angka Partisipasi Murni	74,71	75,8	76,24	80,21	88,18

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2019

APM jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai angka 100%, bahkan untuk jenjang SMP masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di kabupaten Magelang belum optimal.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS pada kelompok umur 7-12 tahun selama tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif, namun apabila dibandingkan tahun 2014 ke tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,25. APS pada kelompok umur 13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, namun masih tetap harus ditingkatkan karena belum mencapai kondisi ideal 100%.

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang
Pendidikan Dasar
Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI (7-12 th)	99,56	99,74	98,18	98,94	99,81
2	SMP/MTs (13-15 th)	93,24	94,08	95,65	96,45	96,78

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2019

Apabila dibandingkan dengan APS tingkat provinsi dan nasional, APS Kabupaten Magelang kelompok usia 7-12 tahun lebih rendah, namun untuk kelompok usia 13-15 tahun lebih tinggi. Berarti untuk kelompok usia 13-15, akses dari penduduk usia sekolah dalam menikmati pendidikan formal di sekolah masyarakat Kabupaten Magelang masih rendah dibanding provinsi dan nasional.

Tabel 2.40
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia
Tahun 2014-2018

No	Tahun	7-12 TAHUN			13-15 TAHUN		
		Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
1	2014	99,56	99,51		93,24	94,85	
2	2015	99,74	99,56	99,09	94,08	95,30	94,72
3	2016	98,18	99,58	99,09	95,65	95,41	94,88
4	2017	98,94	99,62	99,14	96,45	95,48	95,08
5	2018	99,81	99,76	N/A	96,78	95,483	N/A

Sumber: BPS Pusat dan BPS Kabupaten Magelang, 2019

c. Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai 2017 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Sementara itu, angka kelulusan SMP/MTs/Paket B mencapai 100% pada tahun 2015. Data angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99,98	99,98	100,00	99,99	100,00
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99,49	100,00	99,98	99,77	99,91

Sumber Data : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan data tahun 2018, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Artinya proses belajar mengajar di dalam kelas untuk mencetak murid yang sesuai kemampuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dilakukan guru telah berhasil.

d. Rerata Nilai Ujian Nasional

Rerata nilai Ujian Nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai 2018 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Data rerata nilai Ujian Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rerata Nilai UN SD/MI/Paket A	7,77	7,25	7,03	7,59	7,42
Rerata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	5,81	6,19	5,86	5,78	5,79
Rerata Nilai UN	6,79	6,72	6,45	6,69	6,61

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Trend untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan.

e. Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan penilaian sekolah/madrasah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai $85 < \text{nilai} \leq 100$; B (Baik) dengan

nilai $70 < \text{nilai} \leq 85$ dan C (Cukup) dengan nilai $56 \leq \text{nilai} \leq 70$. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.8

Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	98,01	98,51	98,18	98,68	99,34
2	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	90,98	89,60	88,19	86,82	88,37

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 98,01%, naik menjadi 99,34% pada tahun 2018. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 90,98% pada tahun 2014, mengalami penurunan menjadi 88,37% pada tahun 2018. Walaupun belum mencapai 100%, kenaikan persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu pendidikan SD/MI.

f. Kompetensi Pendidik

Pelaksanaan urusan pendidikan dilihat dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.9

Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1 .	Guru memenuhi kualifikasi S1/DIV						
	1.1 Guru SD/MI	%	64,44	74,69	79,66	83,75	86,10
	1.2 Guru SMP/MTs	%	85,22	87,92	87,97	90,48	96,77
2 .	Guru bersertifikasi						
	2.1. Guru SD/MI	%	74,86	81,61	82,00	84,21	86,27
	2.2. Guru SMP/MTs	%	92,82	90,78	91,00	93,36	93,21

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2018

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada tahun 2014 sebesar 74,86%, tahun 2015 sebanyak 81,61%, tahun 2016 sebanyak 82,00% dan tahun 2017 sebanyak 84,21% dan tahun 2018 sebesar 86,27%. Terlihat bahwa jumlah guru

SD/MI yang memiliki kualifikasi SI/DIV menunjukkan trend yang naik. Tahun 2018 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 86,10% berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 13,90%. Selain itu, pada tahun 2017 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak seimbangnya guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Jumlah guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, dari tahun 2014-2018 juga mengalami peningkatan.

Guru yang bersertifikasi di SD/MI maupun di SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017, namun pada tahun 2018 persentase guru yang bersertifikasi mengalami penurunan karena adanya guru bersertifikasi yang pensiun sementara guru baru yang menggantikan tidak bisa langsung bersertifikasi. Persentase guru SD/MI yang bersertifikasi pada tahun 2014 sebesar % 74,86% naik menjadi 86,27% pada tahun 2018. Presentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pada tahun 2014 sebesar 92,82% dan naik menjadi 93,21% pada tahun 2018. Kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru yang tercermin dari sertifikasi guru merupakan salah satu komponen penentu mutu pendidikan. Walaupun menunjukkan trend naik setiap tahun, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi masih perlu .

- g. Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi, serta jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2014- 2018) bersifat fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan dari tahun 2017 ke 2018. Jumlah sarana penyelenggaraan seni di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2014- 2018) statis sejumlah 25. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2014- 2018) menunjukkan adanya peningkatan, pada tahun 2015 sebanyak 695 buah meningkat menjadi 949 buah di tahun 2018.

Tabel 2.44
Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1 .	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	54	44	81	38	126
2 .	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni	25	25	25	25	25
3 .	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diinventarisasi	N/A	698	698	922	949
4 .	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A	N/A	10	10	10

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019

Selain itu perkembangan kelompok budaya yang terlayani dan juga kelompok budaya yang aktif dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Kelompok Budaya Terlayani dan Kelompok Budaya Aktif

Uraian	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Jmlh Kelompok Budaya Terlayani	90	93	164	161
Kelompok kesenian	68	68	138	152
Kelompok Tradisi	11	14	15	0
Kelompok Penghayat	11	11	11	9
Jmlh Kelompok Budaya yang Aktif	2927	3204	3753	3881
Kelompok kesenian	1116	1293	1724	1851
Kelompok Tradisi	1800	1900	2018	2021
Kelompok Penghayat	11	11	11	9
Jumlah Kelompok Budaya Terinventarisasi	3409	3759	4493	4677
Kelompok kesenian	1598	1848	2464	2645
Kelompok Tradisi	1800	1900	2018	2021
Kelompok Penghayat	11	11	11	11

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019

Secara umum gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Tahun 2014- 2018

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK	IKK		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				94.59	95.49	95.89	96.09	96.79	87.02	86.74	89.7	92.66	94.78	92.00	90.84	93.54	96.43	97.92
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B				77.8	78.9	79.95	80.85	81.96	62.40	64.86	62.78	67.76	71.48	80.21	82.21	78.52	83.81	87.21
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A				102.54	102.34	102.14	101.04	101.94	101.33	99.87	103.69	105.87	106.76	98.82	97.59	101.52	104.78	104.73
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B				95.06	95.56	96.06	96.56	97.06	83.52	85.92	82.4	88.38	91.67	87.86	89.91	85.78	91.53	94.45
5	Angka Putus Sekolah SD/MI				0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.1	0.1	0.19	0.05	0.07	62.50	62.50	118.75	33.33	50.00
6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs				0.67	0.65	0.63	0.61	0.59	0.31	0.31	0.35	0.24	0.26	46.27	47.69	55.56	39.34	44.07
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				99.64	99.73	99.82	99.91	99.98	99.98	99.98	100	99.99	100	100.34	100.25	100.18	100.08	100.02
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				99.84	99.88	99.92	99.96	99.99	100	100	99.98	99.77	99.91	100.16	100.12	100.06	99.81	99.92
9	Rerata Nilai UN SD/MI				7.64	7.66	7.68	7.7	7.72	7.77	7.25	7.03	7.59	7.42	101.70	94.65	91.54	98.57	96.11
10	Rerata Nilai UN SMP/MTs				6.4	6.42	6.44	6.46	6.48	5.81	6.19	5.86	5.78	5.79	90.78	96.42	90.99	89.47	89.35

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		NSPK	IKK		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)				82	83	84	85	86	75.83	81.305	83.815	87.115	91.49	92.48	97.96	99.78	102.49	106.38
12	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs				88.82	89.02	89.22	89.42	89.62	89.7	90.08	90.57	91.78	91.3	100.99	101.19	101.51	102.64	101.87
13	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA				67.41	68.22	69.04	69.87	70.7	71.86	75.3	76.33	79.18	79.18	106.60	110.38	110.56	113.32	111.99
14	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI				76.42	78.48	80.55	82.61	84.68	59.97	75.52	82	85.58	73.2	78.47	96.23	101.80	103.60	86.44
15	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs				84.29	85.72	87.14	88.57	90	67.97	81.8	81.8	90.7	78.28	80.64	95.43	93.87	102.40	86.98
16	Penyelenggaraan festival seni dan budaya							38	38				38	126				100.00	331.58
17	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya							18	18				25	25				138.89	138.89
18	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan							66.85	66.95				100	100				149.59	149.37

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi pada periode Tahun 2014-2018 juga dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Gambaran tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014-2016 dapat diikuti pada Tabel 2.11 berikut ini:

TABEL 2.11
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-rata Pertumbuhan 2016-2018	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PENDAPATAN DAERAH											
Pendapatan Asli Daerah											
Dana Perimbangan											
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah											
BELANJA DAERAH											
Belanja tidak langsung											
- Belanja Pegawai											
Belanja langsung											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	938.000.000	1.190.000.000	1.101.800.000	841.340.721	992.402.773	1.027.656.273	89,70	98,17	90,64		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.330.412.450	4.038.141.600	1.587.220.910	1.986.188.924	3.533.029.197	1.064.410.681	85,23	87,49	67,06		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	525.000.000	-	366.460.000	516.799.860	-	366.459.975	98,44	-	100		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	32.000.000	25.000.000	25.000.000	30.631.850	24.499.350	24.999.600	95,72	98,00	100		

capaian kinerja dan keuangan											
Program Pendidikan Anak Usia Dini	747.400.000	728.200.335	-	740.685.866	685.271.645	-	99,10	94,10	-		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	79.850.020.689	197.466.972.597	137.987.468.074	14.402.377.400	185.144.642.55	125.466.107.086..21	18,04	93,76	90,93		
Program Pendidikan Non Formal	683.379.450.	1.970.845.000	1.684.000.000	630.189.290	1.720.913.190	1.594.440.600	92,22	87,32	94,68		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.875.500.000	4.253.586.700	1.862.760.000	2.870.459.450	4.094.341.470	1.838.201.150	99,82	96,26	98,68		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	17.598.899.962	22.483.168.380	31.096.400.250	17.028.613.163	21.680.877.876	30.583.867.105	96,76	96,43	98,35		
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	150.000.000	250.000.000	-	122.830.000	244.509.750	-	81,89	97,80	-		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	50.000.000	50.000.000	74.800.000	38.514.600	49.881.000	54.867.000	77,03	99,76	73,35		
Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	238.000.000	150.000.000	90.000.000	201.689.850	130.227.310	89.296.500	84,74	86,82	99,22		
Program Pengembangan Nilai Budaya	-	2.294.147.000	1.421.838.000	-	2.160.215.895	1.352.109.030	-	96,16	95,10		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	288.883.000	330.473.000	-	268.698.020	325.633.960	-	93,01	98,54		

Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	1.160.652.000	1.031.719.000	-	1.151.089.260	1.011.322.755	-	99,18	98,02		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	525.000.000	2.014.600.000	1.396.600.000	504.679.800	1.709.446.500	1.360.421.850	96,13	84,85	97,41		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparat	21.000.000	175.000.000	175.000.000	20.979.920	173.939.880	174.598.725	99,90	99,39	99,77		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Adapun sasaran global dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adalah:

- 1) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
- 2) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
- 3) Pada Tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
- 4) Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan;
- 5) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi

budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Upaya pemajuan kebudayaan melalui :

1. Pelindungan yaitu upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi
2. Pengembangan yaitu upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan.
3. Pemanfaatan yaitu upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.dan
4. Pembinaan yaitu upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Memajukan kebudayaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Terlebih lagi, pada Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.

Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa dan manusia-manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter.

Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.

Adapun agenda strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan adalah :

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi Budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di Dunia Internasional;
4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem.

Adapun peluang yang dapat menjadi keuntungan dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

1. Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
2. Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain;
3. Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

Tantangan dan peluang pengembangan urusan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Magelang menjadi pedoman penentuan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dalam lima tahun kedepan

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas, sehingga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Pembangunan pendidikan yang dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu ukuran kondisi sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Sebagai salah satu faktor pembentuk IPM, keberhasilan pembangunan pendidikan berpengaruh terhadap keberhasilan Pembanguna manusia.

Kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang sampai saat ini belum optimal. Hal ini ditandai dengan Angka Harapan Lama Sekolah yang lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional (Tahun 2018: Kabupaten Magelang 12,48, Provinsi Jawa Tengah : 12,63 dan nasional : 12,91), Rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dari nasional (Tahun 2018: Kabupaten Magelang 7,41, Provinsi Jawa Tengah 7,27 dan nasional 8,1) dan pencapaian nilai akreditasi sekolah PAUD, SD dan SMP yang berakreditasi minimal B belum mencapai 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang, adalah:

1. Belum optimalnya partisipasi pendidikan, yang ditandai dengan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD dan SMP lebih rendah dari APM Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang belum mencapai 100%.
2. Belum optimalnya mutu pendidikan, ditandai dengan nilai Ujian Nasional dan mutu guru. Terkait mutu guru, dapat dilihat dari guru berkualifikasi S1/DIV pada jenjang SD/MI: 83,75% dan pada jenjang SMP/MTs: 90,48%. Sementara itu guru bersertifikasi pada jenjang SD/MI: 51,49% dan pada jenjang SMP/MTs: 56,31%

Permasalahan terkait urusan kebudayaan adalah Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih rendahnya jumlah Benda situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan, kelompok budaya yang terlayani serta belum maksimalnya kelompok budaya yang aktif .

Pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat dinamis, multi variabel dan multi dimensi seiring dengan irama perubahan peradaban umat manusia yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku serta kebutuhan hidup, baik sebagai individu

maupun makhluk sosial. Artinya mengurai permasalahan pendidikan dan kebudayaan pasti berakar dari dinamika perubahan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan kebutuhan serta wajib berperspektif tantan gan masa depan. Permasalahan bidang pendidikan dan Kebudayaan sangat dinamis meliputi akses, mutu, pelestarian dan pengembangan budaya yang membutuhkan langkah strategis, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka meminimalisir permasalahan dimaksud. Secara rinci, masalah, pokok, masalah dan akar masalah urusan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan relatif rendah	Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
	belum optimalnya keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada pendidikan dasar	Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi
		Anak sekolah yang tidak sesuai usia jenjang sekolahnya cukup tinggi
		Adanya Dampak negatife revolusi digital yg berpotensi besar diakses pelajar Kabupaten Magelang
		keterbatasan ekonomi (tidak punya biaya, bekerja, membantu orang tua); Masalah sosial (berkebuuhan khusus, sakit, Iq rendah, dikeluarkan sekolah, malas), masalah budaya : pernikahan anak
Belum optimalnya mutu pendidikan	Belum optimalnya mutu pendidikan	belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan
		belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan (Prosentase ruang kelas SNP belum mencapai 100%; Sekolah terakreditasi minimal B belum mencapai 100 %
		Standar kompetensi pendidik di Kabupaten Magelang belum memberikan daya dukung maksimal pada IPM
		Guru yang berkualifikasi S1/DIV belum mencapai 100% ; Masih rendahnya guru yang bersertifikasi pendidik
		Banyaknya SD di Kabupaten Magelang yang memiliki murid di bawah batas minimal (> dari 120)
Blm Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan	Belum Optimalnya perlindungan dan pengembangan Kebudayaan	Belum optimalnya penanganan benda, situs dan kawasan cagar budaya

Pemanfaatan) Kebudayaan		
		Banyaknya karya budaya daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung yang kurang mendapat perhatian
		Sarana dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pengelolaan karya budaya

3.2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”**. Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia,
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup,
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Dari ketiga Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 tersebut, yang dapat dijabarkan dalam tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah Misi I yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Makna yang terkandung dalam misi pertama ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Tujuan pertama dalam misi ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dan meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mempunyai tugas untuk membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Adapun fungsi dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
- g. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- h. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- i. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.
- j. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- m. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- p. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kabupaten Magelang tersebut, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2019-2024. Faktor-faktor tersebut terangkum dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
-2	-3	-4	-5	-6
Misi : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			
Program: Pendidikan				
Pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin	Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
Meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/ TK.	Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar. Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan	Belum optimalnya daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah	Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan; Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain (fasilitasi ke Prov oleh Bappeda);	Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi Anak sekolah yang tidak sesuai usia jenjang sekolahnya cukup tinggi Adanya Dampak negatife revolusi digital yg berpotensi besar diakses pelajar Kabupaten Magelang keterbatasan ekonomi (tidak punya biaya, bekerja, membantu orang tua); Masalah sosial (berkebuuhan

	Kebudayaan.			khusus, sakit, Iq rendah, dikeluarkan sekolah, malas), masalah budaya : pernikahan anak
Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan	Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.	Belum optimalnya mutu pendidikan		belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut.	Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.			belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan (Prosentase ruang kelas SNP belum mencapai 100%; Sekolah terakreditasi minimal B belum mencapai 100 % Standar kompetensi pendidik di Kabupaten Magelang belum memberikan daya dukung maksimal pada IPM Guru yang berkualifikasi S1/DIV belum mencapai 100% ; Masih rendahnya guru yang bersertifikasi pendidik
	Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			Banyaknya SD di Kabupaten Magelang yang memiliki murid di bawah batas minimal (> dari 120)
	Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.			
	Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.			
	Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.			

	Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.	Blm Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan		Belum optimalnya penanganan benda, situs dan kawasan cagar budaya Banyaknya karya budaya budaya daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung yang kurang mendapat perhatian Sarana dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pengelolaan karya budaya SMA/K menjadi kewenangan Provinsi
Peningkatan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.	Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.			
Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat	Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja	Tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai nilai budaya.	Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Belum optimalnya daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah	Adanya dorongan yang kuat dari SKPD dan lintas sektor yang lain;	Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi
	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.	Belum optimalnya mutu pendidikan	Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan pelayanan;	Anak sekolah yang tidak sesuai usia jenjang sekolahnya cukup tinggi
	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.	Kurang optimalnya pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan	Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	Adanya Dampak negative revolusi digital yg berpotensi besar di akses pelajar Kabupaten Magelang
	-		Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan			belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan
			Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.			keterbatasan ekonomi (tidak punya biaya, bekerja, membantu orang tua); Masalah sosial
			Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.			Anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi cukup tinggi
			Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.			belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan (Prosentase ruang kelas SNP belum mencapai 100%; Sekolah terakreditasi minimal B belum mencapai 100 %
			Menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.			Standar kompetensi pendidik di Kabupaten Magelang belum memberikan daya dukung maksimal pada IPM
			Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebudayaan.			Guru yang berkualifikasi S1/DIV belum mencapai 100% ; Masih rendahnya guru yang bersertifikasi pendidik
			Menyelenggarakan fasilitasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.			Banyaknya SD di Kabupaten Magelang yang memiliki murid di bawah batas minimal (> dari 120)
			Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.			Banyaknya karya budaya daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung yang hampir punah
			Menyelenggarakan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.			Sarana dan prasarana yang ada belum optimal dalam mendukung pengelolaan karya budaya
			Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.			Banyaknya kesenian khas kabupaten Magelang yang perlu dilestarikan
			Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.			
			Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.			
			Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.			
			Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Perluasan akses pendidikan di Kabupaten Magelang mengakibatkan penambahan ruang kelas baru, unit sekolah baru. Pembangunan satuan pendidikan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau sehingga diharapkan satuan pendidikan menjadi salah satu penyangga ekosistem lingkungan. Penataan Cagar budaya di Kabupaten Magelang juga tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang pada khususnya.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan Pendidikan memberikan sumbangan yang besar dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Permasalahan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan dan kebudayaan yang memerlukan penanganan adalah:

- 1) partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan;
- 2) mutu pendidikan;
- 3) pengelolaan kebudayaan.

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan adalah :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan
- 2) Belum optimalnya mutu pendidikan
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang serta tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Magelang lima tahun kedepan khususnya urusan pendidikan dan kebudayaan. Tujuan dan sasaran tersebut diimplementasikan dalam program/kegiatan dengan tetap memperhatikan isu strategis, pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah dan nasional. Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang adalah : Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan.

Adapun sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang untuk kurun waktu Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
2. Meningkatnya mutu pendidikan.
3. Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan

Adapun hubungan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah	Lama sekolah (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas.	tahun	7,57	7,72	7,86	8,00	8,14	8,27	8,41	8,41
2			Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	tahun	12,48	12,67	12,76	12,92	13,02	13,17	13,27	13,27
3			Presentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	$((\text{Jumlah SD berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SD}) * 100\% + (\text{jumlah SMP berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SMP}) * 100\%) / 2$	persen	93,86	93,89	94,41	94,79	95,19	95,56	95,94	95,94
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan		Angka Partisipasi Kasar (APK)	$(\text{APK PAUD} + \text{APK SD/MI/Paket A} + \text{APK SMP/MTS/Paket B}) / 3$	angka (0-100)	87,74	87,92	89,02	90,12	91,22	92,31	93,41	93,41
5			Angka Partisipasi Murni (APM)	$(\text{APM SD/MI/Paket A} + \text{APM SMP/MTS/Paket B}) / 2$	angka (0-100)	83,13	83,82	84,50	85,19	85,87	86,56	87,24	87,24

6			Angka Partisipasi Sekolah (APS)**	(APS PAUD + APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTS/Paket B)/3	angka (0-100)	94,78	95,42	95,96	96,40	97,03	97,65	98,28	98,28
7		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Rerata Nilai UN	(Rerata Nilai UN SD + Rerata Nilai UN SMP)/2	angka (0-10)	6,61	6,64	6,67	6,71	6,74	6,77	6,81	6,81
8			Angka Kelulusan	(Angka Kelulusan SD+Angka kelulusan SMP)/2	angka (0-100)	99,88	99,90	99,92	99,94	99,96	99,98	100	100
9		Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan	Cakupan pengelolaan kebudayaan	((Persentase Benda Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan)+(Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3	persen	31,44	32,26	32,86	33,31	33,69	34,16	34,6	34,6

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang disusun setiap tahun selama lima tahun kedepan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran, Strategi , dan Kebijakan

Visi :	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH (SEDAYA AMANAH)		
Misi I :	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Mewujudkan wajib belajar 9 tahun
		Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada pendidikan dasar	Regulasi terkait usia anak sekolah per jenjang
			Beasiswa siswa miskin, Bosda dan sekolah inklusi
			Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter

			Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap dengan mengacu SNP
			Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan kompetensi dan karier tenaga pendidik dan kependidikan
			Meningkatkan rasio siswa per sekolah di SD yang siswanya > 120
Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan	Meningkatkan perlindungan dan pengembangan Kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya
			Meningkatkan pelayanan dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung
			Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan karya budaya
			Melestarikan kesenian-kesenian khas

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 7 (tujuh) program, yaitu :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Pendidikan Sekolah Dasar
4. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
6. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan

Adapun klasifikasi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja SKPD yang bersangkutan, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2024, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Pendidikan menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Untuk indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	Angka Partisipasi Kasar (APK)	(APK PAUD + APK SD/MI/Paket A + APK SMP/MTS/Paket B)/3	angka (0-100)	87,74	87,92	89,02	90,12	91,22	92,31	93,41	93,41
2		Angka Partisipasi Murni (APM)	(APM SD/MI/Paket A + APM SMP/MTS/Paket B)/2	angka (0-100)	83,13	83,82	84,50	85,19	85,87	86,56	87,24	87,24
3		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	(APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTS/Paket B)/2	angka (0-100)	94,78	95,42	95,96	96,40	97,03	97,65	98,28	98,28
4		Rerata Nilai UN	(Rerata Nilai UN SD + Rerata Nilai UN SMP)/2	angka (0-10)	6,61	6,64	6,67	6,71	6,74	6,77	6,81	6,81
5		Angka Kelulusan	(Angka Kelulusan SD+Angka kelulusan SMP)/2	angka (0-100)	99,88	99,90	99,92	99,94	99,96	99,98	100	100

6	Cakupan pengelolaan kebudayaan	((Persentase Benda Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan)+(Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3	persen	31,44	32,26	32,86	33,31	33,69	34,16	34,6	34,6
---	--------------------------------	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Angka putus Sekolah SD/MI	(Jumlah Anak Putus Sekolah SD dan MI se-Kabupaten / Jumlah Seluruh siswa SD dan MI se-Kabupaten)*100%	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	(Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya)*100%	91.30	91.85	91.95	92	92.1	92.3	92.5	92.50
Persentase sekolah SD dengan siswa ideal	(Jumlah SD dengan jumlah siswa ideal/jumlah SD)*100%	39.17	39.50	40	40.56	40.89	41.29	41.53	41.53
Persentase SD yang menerapkan pendidikan karakter	(Jumlah- SD yang menerapkan pendidikan karakter/jumlah SD)*100%	NA	NA	25.04	50.08	70.75	100.00	100.00	100.00

Persentase SD – dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	(Jumlah SD dengan sarpras sesuai standar/jumlah SD)*100%	71.31	72.14	73.13	73.96	74.96	75.79	76.62	76.62
Angka putus Sekolah SMP/MTs	(Jumlah Anak Putus Sekolah SMP dan MTs se-Kabupaten / Jumlah Seluruh siswa SMP dan MTs se-Kabupaten)*100%	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21
Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA	(Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA / Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya)*100%	NA	79.6	79.95	80.45	80.65	80.85	81	81.00
persentase SMP yang menerapkan pendidikan karakter)	(Jumlah- SMP yang menerapkan pendidikan karakter/jumlah SMP)*100%	NA	NA	38.46	53.85	69.23	84.62	100.00	100.00
Persentase sekolah SMP dengan jumlah siswa ideal	(Jumlah SMP dengan jumlah siswa ideal/jumlah SMP)*100%	34.38	35.16	35.94	36.72	37.50	38.28	39.06	39.06
Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	(Jumlah SMP dengan sarpras sesuai standar Nasional Pendidikan/jumlah sarpras SMP)*100%	65.89	70.54	72.87	74.42	76.74	79.07	80.62	80.62
Persentase PNF terakreditasi (LKP,PKBM))	(Jumlah PNF terakreditasi /jumlah PNF)*100%	47.83	54.35	60.87	67.39	73.91	82.61	89.13	89.13
Persentase PAUD terakreditasi (TK,KB, SPS)	(Jumlah PAUD terakreditasi /jumlah PAUD)*100%	29.33	37.75	48.99	60.22	71.46	82.70	93.93	93.93

Persentase guru bersertifikat	(Jumlah guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat /jumlah guru PAUD,SD,SMP)*100%	89.70	90	91	92	93	94	95	95.00
Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru	(Jumlah guru yang lulus Uji Kompetensi Guru/jumlah Guru)*100%	NA	64.38	65.40	67.45	68.48	69.56	70.53	70.53
Persentase Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	(Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan/ Jumlahl benda, situs dan kawasan yang terinventarisir)*100%	7.90	9.48	10.54	11.59	12.64	13.70	14.75	14.75
Persentase Karya Budaya yang terlayani	Jmlh Kelompok Budaya terlayani/Jumlah KelompokBudaya terinventarisai	3.44	3.96	4.12	4.20	4.30	4.44	4.51	4.51
Persentase Kelompok seni budaya yg aktif	Jmlh Kelompok Seni Budaya terinventarisasi yg aktif / Jumlah Kelompok Seni Budaya yg terinventarisasi	82.98	83.33	83.92	84.13	84.14	84.34	84.54	84.54

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan dalam rangka mencapai visi, misi Kepala Daerah. Dokumen rencana strategis disusun berdasarkan identifikasi masalah, kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang untuk meraih apa yang akan diinginkan dimasa yang akan datang. Dokumen ini selanjutnya diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja. Dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai pedoman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Disdikbud Kabupaten Magelang adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran dan strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya renstra BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan renja Perangkat Daerah dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA Perubahan).
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra Disdikbud ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disdikbud diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan DPA Disdikbud.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan dalam renstra diperlukan adanya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Disdikbud.

Demi keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu dukungan dari semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019



Plt. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
Kesejahteraan Administrasi Umum

Drs. CHANDRA ENDAH WACANA, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198903 1 008

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan				Rata-rata Lama Sekolah	7,57 tahun	7,72 tahun	7,86 tahun	199.197.375.000	8,00 tahun	200.178.375.000	8,14 tahun	199.626.875.000	8,27 tahun	200.900.375.000	8,41 tahun	200.958.375.000	8,41 tahun	1.000.861.375.000		
				Harapan Lama Sekolah	12,48 tahun	12,67 tahun	12,76 tahun		12,92 tahun		13,02 tahun		13,17 tahun		13,27 tahun		13,27 tahun			
				Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	93,86 persen	93,89 persen	94,41 persen		94,79 persen		95,19 persen		95,56 persen		95,94 persen		95,94 persen			
Meningkatnya mutu pendidikan				Rerata Nilai UN	6,61 angka (0-10)	6,64 angka (0-10)	6,67 angka (0-10)	46.727.972.000	6,71 angka (0-10)	46.727.972.000	6,74 angka (0-10)	46.737.972.000	6,77 angka (0-10)	46.737.972.000	6,81 angka (0-10)	46.757.972.000	6,81 angka (0-10)	233.689.860.000		
				Angka Kelulusan	99,88 angka (0-100)	99,90 angka (0-100)	99,92 angka (0-100)		99,94 angka (0-100)		99,96 angka (0-100)		99,98 angka (0-100)		100 angka (0-100)		100 angka (0-100)			
		1.1.1.1.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	0 %	0 %	100 %	6.975.000.000	100 %	6.975.000.000	100 %	6.985.000.000	100 %	6.985.000.000	100 %	7.005.000.000	100 %	34.925.000.000		
		1.1.1.1.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah Surat yang dikelola	0 surat	0 surat	100000 surat	340.000.000	100000 surat	340.000.000	100000 surat	350.000.000	100000 surat	350.000.000	100000 surat	370.000.000	100000 surat	1.750.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah Kecamatan yang terlayani	0 Kecamatan	0 Kecamatan	21 Kecamatan		21 Kecamatan		21 Kecamatan		21 Kecamatan		21 Kecamatan		21 Kecamatan			
		1.1.1.1.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah rapat koordinasi luar daerah	0 kali	0 kali	300 kali	1.405.000.000	300 kali	1.405.000.000	300 kali	1.405.000.000	300 kali	1.405.000.000	300 kali	1.405.000.000	300 kali	7.025.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah yang melaksanakan perjalanan luar daerah	0 orang	0 orang	101 orang		101 orang		101 orang		101 orang		101 orang		101 orang			
				3. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	0 kali	0 kali	50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali			
				4. Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah	0 SPPD	0 SPPD	500 SPPD		500 SPPD		500 SPPD		500 SPPD		500 SPPD		500 SPPD			
				5. Jumlah kecamatan yang terlayani	0 kecamatan	0 kecamatan	21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan		21 kecamatan			
				6. Jumlah laporan hibah bansos	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		1.1.1.1.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	1. jumlah paket pengadaan perlengkapan/peralatan	0 paket	0 paket	3 paket	2.070.000.000	3 paket	2.070.000.000	3 paket	2.070.000.000	3 paket	2.070.000.000	3 paket	2.070.000.000	3 paket	10.350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Dokumen aset	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		1.1.1.1.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	0 gedung kantor	0 gedung kantor	22 gedung kantor	1.100.000.000	22 gedung kantor	1.100.000.000	22 gedung kantor	1.100.000.000	22 gedung kantor	1.100.000.000	22 gedung kantor	1.100.000.000	22 gedung kantor	5.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air, listrik dan surat kabar	0 rekening bulan	0 rekening bulan	540 rekening bulan		540 rekening bulan		540 rekening bulan		540 rekening bulan		540 rekening bulan		540 rekening bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.1.1.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	0 komplek Gedung Kantor	0 komplek Gedung Kantor	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000	1 komplek Gedung Kantor	7.050.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah peralatan yang dipelihara	0 unit komputer/laptop	0 unit komputer/laptop	40 unit komputer/laptop		40 unit komputer/laptop		40 unit komputer/laptop		40 unit komputer/laptop		40 unit komputer/laptop		40 unit komputer/laptop			
				3. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	0 unit	0 unit	7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit			
				4. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	0 unit	0 unit	125 unit		125 unit		125 unit		125 unit		125 unit		125 unit			
		1.1.1.1.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0 paket	0 paket	4 paket	400.000.000	4 paket	400.000.000	4 paket	400.000.000	4 paket	400.000.000	4 paket	400.000.000	4 paket	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Jumlah ASN yang dibina	0 orang	0 orang	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	1.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah seragam dan Atribut ASN yang disediakan	0 stel	0 stel	0 stel		0 stel		0 stel		0 stel		0 stel		0 stel			
				3. volume rapat kerja dinas	0 kali	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		1.1.1.1.1.1.7.9	Pengadaan Tanah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.26	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase Guru Bersertifikat	89.70 %	90.00 %	91.00 %	39.752.972.000	92.00 %	39.752.972.000	93.00 %	39.752.972.000	94.00 %	39.752.972.000	95.00 %	39.752.972.000	95.00 %	198.764.860.000		
				2. Persentase Guru Yang Lulus Uji Kompetensi Guru	NA %	64.38 %	65.40 %		67.45 %		68.48 %		69.56 %		70.53 %		70.53 %			
		1.1.1.1.1.1.26.1	Pembinaan GTK	1. Jumlah guru yang mengikuti peningkatan integritas	0 Orang	0 Orang	750 Orang	400.000.000	750 Orang	400.000.000	750 Orang	400.000.000	750 Orang	400.000.000	750 Orang	400.000.000	750 Orang	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah laporan hasil kegiatan penataan guru	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				3. Jumlah laporan penanganan kasus	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				4. Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		1.1.1.1.1.1.26.2	Fasilitasi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)	Jumlah kegiatan fasilitasi PKB	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	300.000.000	3 Kegiatan	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.26.3	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidid	1. Jumlah peserta bintek peningkatan kompetensi GTK	0 Orang	0 Orang	160 Orang	700.000.000	160 Orang	700.000.000	160 Orang	700.000.000	160 Orang	700.000.000	160 Orang	700.000.000	160 Orang	3.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah peserta bintek Tim PAK	0 Orang	0 Orang	30 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang			
				3. Jumlah peserta bintek assesor PKG	0 Orang	0 Orang	40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang			
				4. Jumlah peserta bintek guru sekolah inklusi	0 Orang	0 Orang	40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang			
				5. Jumlah peserta bintek pendidikan karakter	0 Orang	0 Orang	40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang			
		1.1.1.1.1.1.26.4	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah guru yang difasilitasi angka kredit	0 Orang	0 Orang	3800 Orang	177.500.000	3800 Orang	177.500.000	3800 Orang	177.500.000	3800 Orang	177.500.000	3800 Orang	177.500.000	3800 Orang	887.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.26.5	Pelaksanaan Sertifikasi guru dan Pengawas	Jumlah guru dan pengawas yang difasilitasi sertifikasinya	0 Orang	0 Orang	4000 Orang	75.000.000	4000 Orang	75.000.000	4000 Orang	75.000.000	4000 Orang	75.000.000	4000 Orang	75.000.000	4000 Orang	375.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.1.1.1.1.26.6	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Jumlah kegiatan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	385.000.000	3 Kegiatan	385.000.000	3 Kegiatan	385.000.000	3 Kegiatan	385.000.000	3 Kegiatan	385.000.000	3 Kegiatan	1.925.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.26.7	BOSDA (Sekolah Negeri)	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan BOSDA	0 orang	0 orang	1662 orang	37.265.472.000	1662 orang	37.265.472.000	1662 orang	37.265.472.000	1662 orang	37.265.472.000	1662 orang	37.265.472.000	1662 orang	186.327.360.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.26.8	Peningkatan Kreativitas Pegawai	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kreatifitas pegawai	0 Orang	0 Orang	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.26.9	Pengembangan Karir	1. Jumlah kepala sekolah yang dinilai kinerjanya/PKKS	na orang	na orang	78 orang	400.000.000	78 orang	400.000.000	78 orang	400.000.000	78 orang	400.000.000	78 orang	400.000.000	78 orang	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah peserta penyiapan dan pembekalan calon KS dan pengawas	na orang	na orang	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang			
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan			Angka Partisipasi Kasar (APK)	87,74 angka (0-100)	87,92 angka (0-100)	89,02 angka (0-100)	148.573.637.000	90,12 angka (0-100)	149.554.637.000	91,22 angka (0-100)	149.093.137.000	92,31 angka (0-100)	150.366.637.000	93,41 angka (0-100)	150.404.637.000	93,41 angka (0-100)	747.992.685.000		
				Angka Partisipasi Murni (APM)	83,13 angka (0-100)	83,82 angka (0-100)	84,50 angka (0-100)		85,19 angka (0-100)		85,87 angka (0-100)		86,56 angka (0-100)		87,24 angka (0-100)		87,24 angka (0-100)			
				Angka Partisipasi Sekolah (APS)**	94,78 angka (0-100)	95,42 angka (0-100)	95,96 angka (0-100)		96,40 angka (0-100)		97,03 angka (0-100)		97,65 angka (0-100)		98,28 angka (0-100)		98,28 angka (0-100)			
		1.1.1.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	0 %	0 %	100 %	2.130.000.000	100 %	2.145.000.000	100 %	727.500.000	100 %	2.170.000.000	100 %	2.170.000.000	100 %	9.342.500.000		
		1.1.1.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. jumlah bulan pelayanan jasa	0 bulan	0 bulan	12 bulan	335.000.000	12 bulan	335.000.000	12 bulan	335.000.000	12 bulan	335.000.000	12 bulan	335.000.000	12 bulan	1.675.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah RKAS, RAPBS yang diteliti	0 Sekolah	0 Sekolah	59 Sekolah		59 Sekolah		59 Sekolah		59 Sekolah		59 Sekolah		59 Sekolah			
		1.1.1.1.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renstra yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	135.000.000	0 Dokumen	135.000.000	0 Dokumen	135.000.000	0 Dokumen	135.000.000	0 Dokumen	135.000.000	0 Dokumen	675.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Dokumen Renja yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				3. Dokumen Profil Pendidikan yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		1.1.1.1.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan (LKJP, LKPI, LPPD, PK dan RFK)	0 Laporan	0 Laporan	17 Laporan	1.560.000.000	17 Laporan	1.575.000.000	17 Laporan	157.500.000	17 Laporan	1.600.000.000	17 Laporan	1.600.000.000	17 Laporan	6.492.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Tersedianya data pokok pendidikan online	0 data online	0 data online	1 data online		1 data online		1 data online		1 data online		1 data online		1 data online			
				3. Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen	na Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		1.1.1.1.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	1. Laporan SPM	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah SOP yg disahkan	0 SOP	0 SOP	5 SOP		5 SOP		5 SOP		5 SOP		5 SOP		5 SOP			
		1.1.1.1.1.1.23	Program Pendidikan Sekolah Dasar	1. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,07 %	0,07 %	0,06 %	89.844.526.000	0,06 %	90.164.526.000	0,05 %	90.848.526.000	0,05 %	90.628.526.000	0,05 %	90.512.526.000	0,05 %	451.998.630.000		
				2. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	91,30 %	91,85 %	91,95 %		92,00 %		92,10 %		92,30 %		92,50 %		92,50 %			
				3. Persentase SD dengan Siswa Ideal	39,17 %	39,50 %	40 %		40,56 %		40,89 %		41,29 %		41,53 %		41,53 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				4. Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	NA %	NA %	25.04 %		50.08 %		75.00 %		100 %		100 %		100 %			
				5. Persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	71.31 %	72.14 %	73.13 %		73.96 %		74.96 %		75.79 %		76.62 %		76.6 %			
		1.1.1.1.1.23.1	Penyelenggaraan US-USBN SD/MI	Jumlah sekolah penyelenggara US-USBN SD/MI yang difasilitasi	0 sekolah	0 sekolah	905 sekolah	735.741.000	907 sekolah	735.741.000	907 sekolah	735.741.000	907 sekolah	735.741.000	907 sekolah	735.741.000	907 sekolah	3.678.705.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salaman	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	30 SD	3.512.000.000	30 SD	3.516.000.000	30 SD	3.520.000.000	30 SD	3.524.000.000	30 SD	3.528.000.000	30 SD	17.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Borobudur	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	27 SD	2.903.200.000	27 SD	2.907.200.000	27 SD	2.911.200.000	27 SD	2.915.200.000	27 SD	2.919.200.000	27 SD	14.556.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngluwar	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	19 SD	1.524.800.000	19 SD	1.528.800.000	19 SD	1.532.800.000	19 SD	1.536.800.000	19 SD	1.540.800.000	19 SD	7.664.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salam	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	19 SD	2.004.000.000	19 SD	2.008.000.000	19 SD	2.012.000.000	19 SD	2.016.000.000	19 SD	2.020.000.000	19 SD	10.060.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Srumbung	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	27 SD	2.015.200.000	27 SD	2.019.200.000	27 SD	2.023.200.000	27 SD	2.027.200.000	27 SD	2.031.200.000	27 SD	10.116.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Dukun	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	25 SD	2.082.400.000	25 SD	2.086.400.000	25 SD	2.090.400.000	25 SD	2.094.400.000	25 SD	2.098.400.000	25 SD	10.452.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Sawangan	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	28 SD	2.813.600.000	28 SD	2.817.600.000	28 SD	2.821.600.000	28 SD	2.825.600.000	28 SD	2.829.600.000	28 SD	14.108.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	30 SD	3.840.000.000	30 SD	3.844.000.000	30 SD	3.848.000.000	30 SD	3.848.000.000	30 SD	3.852.000.000	30 SD	19.232.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mungkid	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	24 SD	2.842.400.000	24 SD	2.846.400.000	24 SD	2.850.400.000	24 SD	2.854.400.000	24 SD	2.858.400.000	24 SD	14.252.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mertoyudan	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	36 SD	4.432.000.000	36 SD	4.436.000.000	36 SD	4.440.000.000	36 SD	4.444.000.000	36 SD	4.448.000.000	36 SD	22.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tempuran	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	23 SD	2.841.600.000	23 SD	2.845.600.000	23 SD	2.849.600.000	23 SD	2.853.600.000	23 SD	2.857.600.000	23 SD	14.248.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kajoran	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	29 SD	2.760.800.000	29 SD	2.764.800.000	29 SD	2.768.800.000	29 SD	2.772.800.000	29 SD	2.776.800.000	29 SD	13.844.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.23.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kaliangkrik	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	23 SD	2.438.400.000	23 SD	2.442.400.000	23 SD	2.446.400.000	23 SD	2.450.400.000	23 SD	2.454.400.000	23 SD	12.232.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.1.1.1.1.23.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Bandongan	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	27 SD	2.537.600.000	27 SD	2.541.600.000	27 SD	2.545.600.000	27 SD	2.549.600.000	27 SD	2.553.600.000	27 SD	12.728.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Candimulyo	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	26 SD	2.616.800.000	26 SD	2.620.800.000	26 SD	2.624.800.000	26 SD	2.628.800.000	26 SD	2.632.800.000	26 SD	13.124.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Pakis	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	31 SD	3.080.000.000	31 SD	3.084.000.000	31 SD	3.088.000.000	31 SD	3.092.000.000	31 SD	3.096.000.000	31 SD	15.440.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngablak	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	23 SD	2.345.600.000	23 SD	2.345.600.000	23 SD	2.349.600.000	23 SD	2.353.600.000	23 SD	2.357.600.000	23 SD	11.752.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Grabag	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	27 SD	4.817.600.000	27 SD	4.821.600.000	27 SD	4.825.600.000	27 SD	4.829.600.000	27 SD	4.833.600.000	27 SD	24.128.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tegalrejo	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	26 SD	2.886.400.000	26 SD	2.870.400.000	26 SD	2.874.400.000	26 SD	2.878.400.000	26 SD	2.882.400.000	26 SD	14.392.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Secang	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	23 SD	3.232.800.000	23 SD	3.236.800.000	23 SD	3.240.800.000	23 SD	3.244.800.000	23 SD	3.248.800.000	23 SD	16.204.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Windusari	Jumlah siswa penerima BOS	0 SD	0 SD	21 SD	2.404.000.000	21 SD	2.408.000.000	21 SD	2.412.000.000	21 SD	2.416.000.000	21 SD	2.420.000.000	21 SD	12.060.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.25	Pengembangan Kurikulum SD	1. Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangannya kurikulumnya	0 Sekolah	0 Sekolah	263 Sekolah	720.000.000	342 Sekolah	720.000.000	342 Sekolah	720.000.000	342 Sekolah	720.000.000	342 Sekolah	720.000.000	342 Sekolah	3.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah guru yang dibantu kurikulum baru	0 guru	0 guru	1000 guru		1400 guru		1400 guru		1400 guru		1400 guru		1400 guru			
		1.1.1.1.1.1.23.26	Pendampingan BSM dan Gulkin SD	1. Jumlah penerima bantuan BSM SD yang didampingi	0 Siswa	0 Siswa	42000 Siswa	90.000.000	45000 Siswa	90.000.000	45000 Siswa	90.000.000	45000 Siswa	90.000.000	45000 Siswa	90.000.000	45000 Siswa	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah penerima Gulkin SD yang didampingi	0 Siswa	0 Siswa	630 Siswa		630 Siswa		840 Siswa		840 Siswa		840 Siswa		840 Siswa			
		1.1.1.1.1.1.23.27	Penyelenggaraan MBS SD	1. Jumlah sekolah yang mengembangkan MBS	0 Sekolah	0 Sekolah	21 Sekolah	344.740.000	42 Sekolah	344.740.000	42 Sekolah	344.740.000	42 Sekolah	344.740.000	42 Sekolah	344.740.000	42 Sekolah	1.723.700.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah komite sekolah yang dilibatkan dalam MBS	0 Komite sekolah	0 Komite sekolah	105 Komite sekolah		105 Komite sekolah		105 Komite sekolah		105 Komite sekolah		105 Komite sekolah		105 Komite sekolah			
		1.1.1.1.1.1.23.28	Pendampingan Operasional BOS SD	1. Jumlah SD penerima BOS	0 Sekolah	0 Sekolah	603 Sekolah	3.753.680.000	604 Sekolah	3.753.680.000	604 Sekolah	3.753.680.000	604 Sekolah	3.753.680.000	604 Sekolah	3.753.680.000	604 Sekolah	18.768.400.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah penerima BOSDA SDS/MIS	0 Sekolah	0 Sekolah	360 Sekolah		361 Sekolah		361 Sekolah		361 Sekolah		361 Sekolah		361 Sekolah			
				3. Jumlah penerima BOSDA SDN	0 Siswa	0 Siswa	86342 Siswa		86342 Siswa		86342 Siswa		86342 Siswa		86342 Siswa		86342 Siswa			
		1.1.1.1.1.1.23.29	Fasilitasi dan Pengembangan SD	1. Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	0 Sekolah	0 Sekolah	19 Sekolah	820.000.000	21 Sekolah	820.000.000	21 Sekolah	820.000.000	21 Sekolah	820.000.000	21 Sekolah	820.000.000	21 Sekolah	4.100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah sekolah inkusi yang mendapat pendampingan	0 Sekolah	0 Sekolah	30 Sekolah		35 Sekolah		35 Sekolah		35 Sekolah		35 Sekolah		35 Sekolah			
				3. Jumlah sekolah Adiwiyata yang mendapat pendampingan	0 Sekolah	0 Sekolah	42 Sekolah		42 Sekolah		42 Sekolah		42 Sekolah		42 Sekolah		42 Sekolah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				4. Jumlah sekolah aman bencana yang memiliki SOP	0 siswa dan guru	0 siswa dan guru	100 siswa dan guru		125 siswa dan guru		150 siswa dan guru		175 siswa dan guru		200 siswa dan guru		200 siswa dan guru			
				5. Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program rumah anak	0 sekolah	0 sekolah	21 sekolah		21 sekolah		21 sekolah		21 sekolah		21 sekolah		105 sekolah			
		1.1.1.1.1.1.23.30	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SD	Jumlah sekolah yang difasilitasi penataan kelembagaan	0 Sekolah	0 Sekolah	50 Sekolah	20.000.000	50 Sekolah	20.000.000	50 Sekolah	20.000.000	50 Sekolah	20.000.000	50 Sekolah	20.000.000	50 Sekolah	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.31	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik	1. Jumlah lomba yang terselenggara	0 Kegiatan	0 Kegiatan	52 Kegiatan	1.435.715.000	52 Kegiatan	1.435.715.000	55 Kegiatan	1.435.715.000	55 Kegiatan	1.435.715.000	55 Kegiatan	1.435.715.000	55 Kegiatan	7.178.575.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah penerima beasiswa prestasi	0 Siswa	0 Siswa	1859 Siswa		1859 Siswa		1859 Siswa		1859 Siswa		1859 Siswa		1859 Siswa			
				3. Jumlah sekolah pengimplementasi pendidikan karakter	0 sekolah	0 sekolah	120 sekolah		151 sekolah		151 sekolah		151 sekolah		151 sekolah		151 sekolah			
				4. Jumlah juknis pendidikan karakter	0 juknis	0 juknis	1 juknis		1 juknis		1 juknis		1 juknis		1 juknis		1 juknis			
		1.1.1.1.1.1.23.32	Pembinaan Pendidikan Karakter SD	Jumlah penyelenggara sekolah berkarakter	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0	151 Sekolah	150.000.000	151 Sekolah	150.000.000	151 Sekolah	150.000.000	151 Sekolah	150.000.000	0 Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.33	Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD	1. Jumlah penyelenggara lomba perpustakaan	0 Sekolah	0 Sekolah	21 Sekolah	289.450.000	21 Sekolah	289.450.000	21 Sekolah	289.450.000	21 Sekolah	289.450.000	21 Sekolah	289.450.000	21 Sekolah	1.447.250.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah sekolah yang didampingi pelaksanaan akreditasinya	0 Sekolah	0 Sekolah	100 Sekolah		125 Sekolah		125 Sekolah		125 Sekolah		125 Sekolah		125 Sekolah			
				3. Jumlah sekolah peserta lomba gugus (SD Inti)	0 SD Inti	0 SD Inti	93 SD Inti		93 SD Inti		93 SD Inti		93 SD Inti		93 SD Inti		93 SD Inti			
		1.1.1.1.1.1.23.34	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SD (Ban Gub)	Jumlah paket bantuan	0 paket	0 paket	5 paket	30.000.000	5 paket	30.000.000	5 paket	30.000.000	5 paket	30.000.000	5 paket	30.000.000	5 paket	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.35	Pengadaan Tanah untuk Pengembangan SD	Luas lahan pengembangan sekolah	0 M2	0 M2	0 M2	0	0 M2	0	500 M2	500.000.000	200 M2	200.000.000	0 M2	0	0 M2	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.36	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah penerima bantuan	0 Sekolah	0 Sekolah	211 Sekolah	15.834.000.000	226 Sekolah	15.834.000.000	241 Sekolah	15.834.000.000	257 Sekolah	15.834.000.000	272 Sekolah	15.834.000.000	272 Sekolah	79.170.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.37	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta	Jumlah penerima bantuan	0 Sekolah	0 Sekolah	50 Sekolah	5.790.000.000	50 Sekolah	5.900.000.000	50 Sekolah	6.000.000.000	50 Sekolah	6.000.000.000	50 Sekolah	6.000.000.000	50 Sekolah	29.690.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.23.38	Fasilitasi PPDB SD	Jumlah SDN yang melaksanakan PPDB	0 SD	0 SD	554 SD	50.000.000	554 SD	50.000.000	554 SD	50.000.000	554 SD	50.000.000	554 SD	50.000.000	554 SD	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,26 %	0,25 %	0,24 %	48.738.245.000	0,23 %	49.384.245.000	0,22 %	49.656.245.000	0,22 %	49.707.245.000	0,21 %	49.861.245.000	0,21 %	247.347.225.000		
				2. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	NA %	79,60 %	79,95 %		80,45 %		80,65 %		80,85 %		81,00 %		81,00 %			
				3. Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter	NA %	NA %	38,46 %		53,85 %		69,23 %		84,62 %		100 %		100 %			
				4. Persentase SMP dengan Jumlah Siswa Ideal	34,38 %	35,16 %	35,94 %		36,72 %		37,5 %		38,28 %		39,06 %		39,06 %			
				5. Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	65,89 %	70,54 %	72,87 %		74,42 %		76,74 %		79,07 %		80,62 %		80,62 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.1.1.1.1.24.1	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	556 Siswa	556.000.000	587 Siswa	587.000.000	588 Siswa	588.000.000	588 Siswa	588.000.000	588 Siswa	588.000.000	588 Siswa	2.907.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.2	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.880.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.3	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	664 Siswa	664.000.000	668 Siswa	668.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	3.348.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	586 Siswa	586.000.000	588 Siswa	588.000.000	588 Siswa	588.000.000	588 Siswa	588.000.000	588 Siswa	588.000.000	588 Siswa	2.938.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	354 Siswa	354.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	1.890.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.880.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	686 Siswa	697.000.000	697 Siswa	697.000.000	697 Siswa	697.000.000	697 Siswa	697.000.000	697 Siswa	697.000.000	697 Siswa	3.485.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	261 Siswa	261.000.000	286 Siswa	286.000.000	288 Siswa	288.000.000	288 Siswa	288.000.000	288 Siswa	288.000.000	288 Siswa	1.411.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	650 Siswa	650.000.000	657 Siswa	657.000.000	664 Siswa	664.000.000	662 Siswa	662.000.000	662 Siswa	662.000.000	662 Siswa	3.295.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	449 Siswa	431.000.000	477 Siswa	431.000.000	480 Siswa	431.000.000	480 Siswa	431.000.000	480 Siswa	431.000.000	480 Siswa	2.155.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	508 Siswa	508.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.812.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	261 Siswa	261.000.000	265 Siswa	265.000.000	290 Siswa	290.000.000	300 Siswa	300.000.000	300 Siswa	300.000.000	300 Siswa	1.416.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	768 Siswa	768.000.000	768 Siswa	768.000.000	768 Siswa	768.000.000	768 Siswa	768.000.000	768 Siswa	768.000.000	768 Siswa	3.840.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	480 Siswa	160.000.000	480 Siswa	160.000.000	480 Siswa	160.000.000	480 Siswa	160.000.000	480 Siswa	160.000.000	480 Siswa	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	571 Siswa	571.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.875.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.1.1.1.1.24.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	608 Siswa	608.000.000	640 Siswa	640.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	3.264.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.880.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	475 Siswa	475.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	2.395.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	638 Siswa	638.000.000	608 Siswa	608.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.974.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	260 Siswa	260.000.000	280 Siswa	280.000.000	300 Siswa	300.000.000	320 Siswa	320.000.000	320 Siswa	320.000.000	320 Siswa	1.480.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.880.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	503 Siswa	503.000.000	544 Siswa	544.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.775.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	567 Siswa	567.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.871.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	559 Siswa	559.000.000	574 Siswa	574.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.861.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.25	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	446 Siswa	446.000.000	448 Siswa	448.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	2.334.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.26	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GLUWAR	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	663 Siswa	663.000.000	671 Siswa	671.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	3.350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.27	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	667 Siswa	667.000.000	670 Siswa	670.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	672.000.000	672 Siswa	3.353.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.28	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	529 Siswa	529.000.000	540 Siswa	540.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.797.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.29	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	138 Siswa	138.000.000	141 Siswa	141.000.000	150 Siswa	150.000.000	150 Siswa	150.000.000	150 Siswa	150.000.000	150 Siswa	729.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.30	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	566 Siswa	566.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.870.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.1.1.1.1.24.31	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	744 Siswa	744.000.000	750 Siswa	750.000.000	750 Siswa	750.000.000	750 Siswa	750.000.000	750 Siswa	750.000.000	750 Siswa	3.744.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.32	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	269 Siswa	269.000.000	288 Siswa	288.000.000	288 Siswa	288.000.000	288 Siswa	288.000.000	288 Siswa	288.000.000	288 Siswa	1.421.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.33	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.880.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.34	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	392 Siswa	392.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	480.000.000	480 Siswa	2.312.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.35	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	361 Siswa	361.000.000	381 Siswa	381.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	1.894.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.36	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	574 Siswa	574.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.878.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.37	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	567 Siswa	567.000.000	572 Siswa	572.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.867.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.38	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	245 Siswa	245.000.000	277 Siswa	277.000.000	277 Siswa	277.000.000	277 Siswa	277.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	1.460.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.39	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	576.000.000	576 Siswa	2.880.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.40	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	563 Siswa	563.000.000	569 Siswa	569.000.000	576 Siswa	576.000.000	583 Siswa	583.000.000	590 Siswa	590.000.000	590 Siswa	2.881.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.41	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	535 Siswa	535.000.000	545 Siswa	545.000.000	545 Siswa	545.000.000	551 Siswa	551.000.000	553 Siswa	553.000.000	553 Siswa	2.729.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.42	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	776 Siswa	776.000.000	776 Siswa	776.000.000	776 Siswa	776.000.000	776 Siswa	776.000.000	776 Siswa	776.000.000	776 Siswa	3.880.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	359 Siswa	359.000.000	379 Siswa	379.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	1.890.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.44	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	436 Siswa	294.000.000	436 Siswa	352.000.000	436 Siswa	384.000.000	436 Siswa	384.000.000	436 Siswa	384.000.000	436 Siswa	1.798.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.45	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	272 Siswa	272.000.000	287 Siswa	287.000.000	315 Siswa	315.000.000	325 Siswa	325.000.000	335 Siswa	335.000.000	335 Siswa	1.534.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.1.1.1.1.24.46	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	1.920.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.47	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	1.920.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.48	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	341 Siswa	341.000.000	349 Siswa	349.000.000	349 Siswa	349.000.000	349 Siswa	349.000.000	349 Siswa	349.000.000	349 Siswa	1.737.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.49	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAK	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	436 Siswa	162.000.000	436 Siswa	162.000.000	436 Siswa	162.000.000	436 Siswa	162.000.000	436 Siswa	162.000.000	436 Siswa	810.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.50	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAK	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	162 Siswa	96.000.000	162 Siswa	96.000.000	162 Siswa	96.000.000	162 Siswa	96.000.000	162 Siswa	96.000.000	162 Siswa	480.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.51	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	364 Siswa	364.000.000	404 Siswa	404.000.000	404 Siswa	404.000.000	404 Siswa	404.000.000	404 Siswa	404.000.000	404 Siswa	1.980.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.52	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	380 Siswa	380.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	384.000.000	384 Siswa	1.916.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.53	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	82 Siswa	82.000.000	83 Siswa	83.000.000	83 Siswa	83.000.000	84 Siswa	84.000.000	84 Siswa	84.000.000	84 Siswa	416.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.54	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	196 Siswa	196.000.000	200 Siswa	200.000.000	200 Siswa	200.000.000	200 Siswa	200.000.000	200 Siswa	200.000.000	200 Siswa	996.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.55	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	51 Siswa	51.000.000	49 Siswa	49.000.000	60 Siswa	60.000.000	40 Siswa	40.000.000	60 Siswa	60.000.000	60 Siswa	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.56	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	100 Siswa	100.000.000	105 Siswa	105.000.000	110 Siswa	110.000.000	115 Siswa	115.000.000	120 Siswa	120.000.000	120 Siswa	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.57	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	115 Siswa	115.000.000	110 Siswa	110.000.000	117 Siswa	117.000.000	128 Siswa	128.000.000	130 Siswa	130.000.000	130 Siswa	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.58	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	380 Siswa	288.000.000	380 Siswa	288.000.000	380 Siswa	288.000.000	380 Siswa	288.000.000	380 Siswa	288.000.000	380 Siswa	1.440.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.59	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	0 Siswa	0 Siswa	72 Siswa	72.000.000	77 Siswa	77.000.000	74 Siswa	74.000.000	77 Siswa	77.000.000	78 Siswa	78.000.000	78 Siswa	378.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.24.60	Penyelenggaraan UN	Jumlah SMP/MTs yang terfasilitasi	0 sekolah/madrasah	0 sekolah/madrasah	213 sekolah/madrasah	525.000.000	213 sekolah/madrasah	525.000.000	213 sekolah/madrasah	525.000.000	213 sekolah/madrasah	525.000.000	213 sekolah/madrasah	525.000.000	213 sekolah/madrasah	2.625.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.				
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1.1.1.1.1.1.24.61	Pendampingan Operasional BOS SMP	1. Jumlah penerima BOS	0 sekolah	0 sekolah	130 sekolah	1.737.300.000	130 sekolah	1.737.300.000	130 sekolah	1.737.300.000	130 sekolah	1.737.300.000	130 sekolah	1.737.300.000	130 sekolah	8.686.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				2. Jumlah SMP Swasta penerima BOSDA	0 sekolah	0 sekolah	68 sekolah		68 sekolah		68 sekolah		68 sekolah		68 sekolah		68 sekolah					
				3. Jumlah M.Ts penerima BOSDA	0 madrasah	0 madrasah	71 madrasah		71 madrasah		71 madrasah		71 madrasah		71 madrasah		71 madrasah					
				4. Jumlah laporan BOS	0 sekolah	0 sekolah	130 sekolah		130 sekolah		130 sekolah		130 sekolah		130 sekolah		130 sekolah					
				5. Jumlah laporan BOSDA SMP Swasta dan M.Ts	0 sekolah/madrasah	0 sekolah/madrasah	139 sekolah/madrasah		139 sekolah/madrasah		139 sekolah/madrasah		139 sekolah/madrasah		139 sekolah/madrasah		139 sekolah/madrasah					
		1.1.1.1.1.1.24.62	Pengembangan dan penjaminan mutu SMP	1. Jumlah mapel yang ditekankan	0 mapel	0 mapel	4 mapel	1.030.000.000	4 mapel	1.030.000.000	4 mapel	1.030.000.000	4 mapel	1.030.000.000	4 mapel	1.030.000.000	4 mapel	5.150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				2. Jumlah sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan	0 sekolah	0 sekolah	21 sekolah		21 sekolah		21 sekolah		21 sekolah		21 sekolah		21 sekolah					
				3. Jumlah sekolah yang disurveil akreditasi	0 sekolah	0 sekolah	26 sekolah		26 sekolah		26 sekolah		26 sekolah		26 sekolah		26 sekolah					
				4. Jumlah SMP Terbuka yang difasilitasi	0 sekolah	0 sekolah	15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah					
				5. Jumlah SMP Terbuka yang mengikuti lomojari	0 sekolah	0 sekolah	15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah		15 sekolah					
		1.1.1.1.1.1.24.63	Pendampingan BSM dan GULKIN SMP	Jumlah siswa yang menerima BSM/Gulkin	0 anak	0 anak	1250 anak	655.000.000	1200 anak	655.000.000	1200 anak	655.000.000	1200 anak	655.000.000	1200 anak	655.000.000	1200 anak	3.275.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.1.1.1.1.1.24.64	Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengutan kurikulum	0 sekolah	0 sekolah	130 sekolah	200.000.000	130 sekolah	200.000.000	130 sekolah	200.000.000	130 sekolah	200.000.000	130 sekolah	200.000.000	130 sekolah	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.1.1.1.1.1.24.65	Fasilitasi PPDB	Jumlah sekolah dengan PPDB Online	0 SMPN	0 SMPN	59 SMPN	273.585.000	59 SMPN	273.585.000	59 SMPN	273.585.000	59 SMPN	273.585.000	59 SMPN	273.585.000	59 SMPN	1.367.925.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.1.1.1.1.1.24.66	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik SMP	1. Jumlah lomba yang terselenggara	0 kegiatan	0 kegiatan	57 kegiatan	1.300.000.000	57 kegiatan	1.300.000.000	57 kegiatan	1.300.000.000	57 kegiatan	1.300.000.000	57 kegiatan	1.300.000.000	57 kegiatan	6.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				2. Jumlah penerima beasiswa prestasi	0 anak	0 anak	1300 anak		1300 anak		1300 anak		1300 anak		1300 anak		1300 anak					
				3. Jumlah sekolah yang didampingi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter	0 sekolah	0 sekolah	16 sekolah		16 sekolah		16 sekolah		16 sekolah		16 sekolah		16 sekolah					
				4. Jumlah juknis pendidikan karakter	0 juknis	0 juknis	1 juknis		1 juknis		1 juknis		1 juknis		1 juknis		1 juknis					
		1.1.1.1.1.1.24.67	Fasilitasi dan pengembangan SMP	1. Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	0 sekolah	0 sekolah	12 sekolah	350.000.000	12 sekolah	350.000.000	12 sekolah	350.000.000	12 sekolah	350.000.000	12 sekolah	350.000.000	12 sekolah	350.000.000	60 sekolah	1.750.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan	0 sekolah	0 sekolah	4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		20 sekolah			
				3. Jumlah sekolah adiwiyata yang mendapat pendampingan	0 sekolah	0 sekolah	8 sekolah		8 sekolah		8 sekolah		8 sekolah		8 sekolah		8 sekolah		40 sekolah			
				4. Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program ramah anak	0 sekolah	0 sekolah	16 sekolah		16 sekolah		16 sekolah		16 sekolah		16 sekolah		16 sekolah		90 sekolah			
		1.1.1.1.1.1.24.68	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (Ban Gub)	Jumlah paket bantuan	0 Paket	0 Paket	4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.1.1.1.1.1.24.70	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SMP	Kesesuaian antar hasil akreditasi dengan layanan pendidikan	0 sekolah	0 sekolah	26 sekolah	130.000.000	52 sekolah	130.000.000	52 sekolah	130.000.000	52 sekolah	130.000.000	52 sekolah	130.000.000	52 sekolah	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		1.1.1.1.1.1.24.71	Pengadaan Tanah Pengembangan SMP	1. Bidang tanah	0 bidang	0 bidang	0 bidang	0	0 bidang	0	1 bidang	0	1 bidang	0	1 bidang	0	3 bidang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
				2. Dokumen FS	0 dok	0 dok	0 dok		1 dok		0 dok		0 dok		0 dok		0 dok					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.1.1.1.1.24.72	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP	1. Jumlah paket talud & pagar sekolah	0 paket	0 paket	12 paket	9.767.360.000	12 paket	9.767.360.000	12 paket	9.767.360.000	12 paket	9.767.360.000	12 paket	9.767.360.000	12 paket	48.836.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah pengadaan media pembelajaran	0 unit	0 unit	333 unit		273 unit		273 unit		273 unit		273 unit		273 unit			
				3. Jumlah pengadaan genset	0 unit	0 unit	3 unit		26 unit		26 unit		26 unit		26 unit		26 unit			
				4. Jumlah paket pengadaan komputer jaringan	0 paket	0 paket	10 paket		18 paket		18 paket		18 paket		18 paket		18 paket			
		1.1.1.1.1.1.24.73	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah paket sarpras sekolah	0 paket	0 paket	26 paket	7.252.000.000	52 paket	7.252.000.000	52 paket	7.252.000.000	52 paket	7.252.000.000	52 paket	7.252.000.000	52 paket	36.260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.1.25	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1. Persentase PNF Terakreditasi (LKP, PKBM)	47.83 %	54.35 %	60.87 %	7.860.866.000	67.39 %	7.860.866.000	73.91 %	7.860.866.000	82.61 %	7.860.866.000	89.13 %	7.860.866.000	89.13 %	39.304.330.000		
				2. Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	29.33 %	37.75 %	48.99 %		60.22 %		71.46 %		82.70 %		93.93 %		93.93 %			
		1.1.1.1.1.1.25.1	Pembelajaran PAUD	1. Pendidik PAUD yang mengikuti workshop	0 orang	0 orang	200 orang	600.000.000	200 orang	600.000.000	200 orang	600.000.000	200 orang	600.000.000	200 orang	600.000.000	200 orang	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah pendidik yang mengikuti bintek	0 orang	0 orang	400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		400 orang			
		1.1.1.1.1.1.25.2	Fasilitasi dan pengembangan PAUD	1. Jumlah Kecamatan yang difasilitasi GOPFKI dan BUNDA PAUD	0 Kelompok	0 Kelompok	21 Kelompok	294.000.000	21 Kelompok	294.000.000	21 Kelompok	294.000.000	21 Kelompok	294.000.000	21 Kelompok	294.000.000	21 Kelompok	1.470.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah Gugus PAUD yang difasilitasi	0 Gugus	0 Gugus	21 Gugus		21 Gugus		21 Gugus		21 Gugus		21 Gugus		21 Gugus			
				3. Jumlah kegiatan Semarak PAUD	0 Lomba	0 Lomba	1 Lomba		1 Lomba		1 Lomba		1 Lomba		1 Lomba		1 Lomba			
				4. Jumlah PAUD yang difasilitasi menjadi PAUD HI	0 Lembaga	0 Lembaga	46 Lembaga		100 Lembaga		100 Lembaga		100 Lembaga		100 Lembaga		100 Lembaga			
		1.1.1.1.1.1.25.3	Pendampingan Operasional BOP PAUD	1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi BOP PAUD	0 lembaga	0 lembaga	760 lembaga	1.420.866.000	760 lembaga	1.420.866.000	760 lembaga	1.420.866.000	760 lembaga	1.420.866.000	760 lembaga	1.420.866.000	760 lembaga	7.104.330.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah pendidik PAUD yang menerima Bantuan Transport	0 guru	0 guru	500 guru		500 guru		500 guru		500 guru		500 guru		500 guru			
		1.1.1.1.1.1.25.4	Penyelenggaraan UNPK Paket A, B dan C	1. Jumlah Kelompok/Lembaga Paket A yang difasilitasi	0 Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga	1.695.000.000	4 Lembaga	1.695.000.000	4 Lembaga	1.695.000.000	4 Lembaga	1.695.000.000	4 Lembaga	1.695.000.000	4 Lembaga	8.475.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah Kelompok/Lembaga Paket B yang difasilitasi	0 Lembaga	0 Lembaga	30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga			
				3. Jumlah Kelompok/Lembaga Paket C yang difasilitasi	0 Lembaga	0 Lembaga	60 Lembaga		60 Lembaga		60 Lembaga		60 Lembaga		60 Lembaga		60 Lembaga			
				4. Jumlah tutor yang mengikuti Pelatihan E-Learning	0 orang	0 orang	20 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang			
		1.1.1.1.1.1.25.5	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Keluarga	1. Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi Bindikel	0 Lembaga	0 Lembaga	440 Lembaga	250.000.000	440 Lembaga	250.000.000	440 Lembaga	250.000.000	440 Lembaga	250.000.000	440 Lembaga	250.000.000	440 Lembaga	1.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Lembaga TBM penerima bantuan	0 Lembaga	0 Lembaga	25 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga			
		1.1.1.1.1.1.25.6	Penyelenggaraan UNPK Paket A, B dan C	Jumlah siswa paket ABC yang difasilitasi USBN dan UN	0 orang	0 orang	1000 orang	350.000.000	850 orang	350.000.000	850 orang	350.000.000	850 orang	350.000.000	850 orang	350.000.000	850 orang	1.750.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.25.7	Peningkatan mutu sarana prasarana PAUD dan Dikmas	1. Jumlah PAUD yang menerima APE	0 PAUD	0 PAUD	35 PAUD	685.000.000	88 PAUD	685.000.000	88 PAUD	685.000.000	88 PAUD	685.000.000	88 PAUD	685.000.000	88 PAUD	3.425.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah lembaga PAUD yang menerima Bantuan Sarpras	0 PAUD	0 PAUD	21 PAUD		88 PAUD		88 PAUD		88 PAUD		88 PAUD		88 PAUD			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3. Jumlah Lembaga LKP/PKBM yang menerima bantuan Sarpras	0 Lembaga	0 Lembaga	4 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga			
		1.1.1.1.1.1.25.8	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas	1. Jumlah Lembaga Paud dan Dikmas yang difasilitasi proses akreditasi	0 Lembaga	0 Lembaga	75 Lembaga	230.000.000	180 Lembaga	230.000.000	180 Lembaga	230.000.000	180 Lembaga	230.000.000	180 Lembaga	230.000.000	180 Lembaga	1.150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah lembaga PAud dan Dikmas yang dibina sesuai dengan tupoksi	0 Peserta	0 Peserta	120 Peserta		150 Peserta		150 Peserta		150 Peserta		150 Peserta		150 Peserta			
				3. Jumlah peserta lomba apresiasi PAud dan Dikmas yang difasilitasi	0 orang	0 orang	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang			
		1.1.1.1.1.1.25.9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	Jumlah penerima BOP Kesetaraan	0 Lembaga	0 Lembaga	24 Lembaga	836.000.000	21 Lembaga	836.000.000	21 Lembaga	836.000.000	21 Lembaga	836.000.000	21 Lembaga	836.000.000	21 Lembaga	4.180.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.1.1.1.1.1.25.10	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)	Jumlah bantuan yang diterima	0 paket	0 paket	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	7.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Meningkatnya pengelolaan (periferal, pengembangan dan pemanfaatan) kebudayaan			Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	31.44 persen	32.26 persen	32.86 persen	3.895.766.000	33.31 persen	3.895.766.000	33.69 persen	3.795.766.000	34.16 persen	3.795.766.000	34.60 persen	3.795.766.000	34.60 persen	19.178.830.000		
		2.16.1.1.1.1.21	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan	1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7.90 Persen	9.48 Persen	10.54 Persen	3.895.766.000	11.59 Persen	3.895.766.000	12.64 Persen	3.795.766.000	13.70 Persen	3.795.766.000	14.75 Persen	3.795.766.000	14.75 Persen	19.178.830.000		
				2. Persentase Karya Budaya yang Terlayani	3.44 Persen	3.96 Persen	4.12 Persen		4.20 Persen		4.30 Persen		4.44 Persen		4.51 Persen		4.51 Persen			
				3. Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	82.98 Persen	83.33 Persen	83.92 Persen		84.13 Persen		84.14 Persen		84.34 Persen		84.54 Persen		84.54 Persen			
		2.16.1.1.1.1.21.1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	1. Jumlah Kelompok Adat Yang Dibina	21 Kelompok	21 Kelompok	21 Kelompok	740.000.000	21 Kelompok	740.000.000	21 Kelompok	740.000.000	21 Kelompok	740.000.000	21 Kelompok	740.000.000	21 Kelompok	3.700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah permainan tradisional yang dilestarikan	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis			
				3. Jumlah Naskah Jawa dan Geguritan yang dihasilkan	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah		20 Naskah		20 Naskah		20 Naskah		20 Naskah		20 Naskah			
				4. Jumlah Tosan Aji yang dijamas dan dipamerkan	152 Buah	152 Buah	152 Buah		152 Buah		152 Buah		152 Buah		152 Buah		152 Buah			
				5. Jumlah Upacara Tradisi yang Difasilitasi	21 Upacara Tradisi	21 Upacara Tradisi	21 Upacara Tradisi		21 Upacara Tradisi		21 Upacara Tradisi		21 Upacara Tradisi		21 Upacara Tradisi		21 Upacara Tradisi			
		2.16.1.1.1.1.21.2	Sejarah dan Pelestarian Nilai Tradisi	1. Jumlah OPK WBTB	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	227.327.700	3 Kelompok	227.327.700	3 Kelompok	227.327.700	3 Kelompok	227.327.700	3 Kelompok	227.327.700	3 Kelompok	1.136.638.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah peserta penghayat kepercayaan	11 organisasi	11 organisasi	11 organisasi		11 organisasi		11 organisasi		11 organisasi		11 organisasi		11 organisasi			
				3. Jumlah peserta lawatan sejarah	90 orang	90 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang			
		2.16.1.1.1.1.21.3	Pertunjukan Seni Budaya	1. Jumlah Festival	4 festival	4 festival	4 festival	1.725.000.000	4 festival	1.725.000.000	4 festival	1.725.000.000	4 festival	1.725.000.000	4 festival	1.725.000.000	4 festival	8.625.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah pertunjukan	10 pertunjukan	10 pertunjukan	10 pertunjukan		10 pertunjukan		10 pertunjukan		10 pertunjukan		10 pertunjukan		10 pertunjukan			
				3. Jumlah Kesenian yang dikirim	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok		6 Kelompok		6 Kelompok		6 Kelompok		6 Kelompok		6 Kelompok			
		2.16.1.1.1.1.21.4	Fasilitasi dan Infentarisasi Seni Budaya	1. Jumlah Kesenian yang didata	0 kesenian	0 kesenian	100 kesenian	180.000.000	100 kesenian	180.000.000	0 kesenian	80.000.000	0 kesenian	80.000.000	0 kesenian	80.000.000	0 kesenian	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2. Jumlah Film Dokumenter yang dihasilkan	0 Film	0 Film	3 Film		3 Film		3 Film		3 Film		3 Film		3 Film			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.			
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				3. Jumlah Kesenian yang didokumentasikan	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen				
		2.16.1.1.1.1.21.5	Perlindungan Benda Cagar Budaya	1. Jumlah BCB yang dipelihara	0 BCB	0 BCB	949 BCB	360.554.000	949 BCB	360.554.000	949 BCB	360.554.000	949 BCB	360.554.000	949 BCB	360.554.000	949 BCB	1.802.770.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				2. Jumlah Juru pelihara yang mendapat pembinaan	0 orang	0 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang				
		2.16.1.1.1.1.21.6	Edukasi Berbasis Kebudayaan	1. Jumlah peserta kemah budaya	0 orang	0 orang	250 orang	212.884.300	250 orang	212.884.300	250 orang	212.884.300	250 orang	212.884.300	250 orang	212.884.300	250 orang	1.064.421.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				2. Jumlah peserta lomba karya ilmiah	0 orang	0 orang	80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang				
				3. Jumlah peserta edukasi berbasis budaya	0 orang	0 orang	80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang				
		2.16.1.1.1.1.21.7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (DAK Non Fisik)	Operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya	0 paket	0 paket	1 paket	450.000.000	1 paket	450.000.000	1 paket	450.000.000	1 paket	450.000.000	1 paket	450.000.000	1 paket	2.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Jumlah								199.197.375.000	200.178.375.000	199.626.875.000	200.900.375.000	200.958.375.000	1.000.861.375.000								